



Universitas  
Lampung

# PENERAPAN STANDAR PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN (SPK) DI INDONESIA BERBASIS IFRS S1 DAN S2

Mata kuliah: Teori Akuntansi  
Kelompok 14

Pendidikan Ekonomi →

2024 B





**Universitas  
Lampung**

# PENYUSUN:

**M. Syafiq Al Ghifary**

2413031044

**01**



**Alzirah Sabrina**

2413031049

**02**

**03**

**Arshella Cahya Yuniarti**

2413031058



### Relevansi Topik

IFRS S1: General Requirements for Sustainability-related Financial Disclosures dan IFRS S2: Climate-related Disclosures.

# PENDAHULUAN

- Isu keberlanjutan (sustainability) telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam praktik bisnis dan akuntansi modern. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, ketidakadilan sosial, dan tata kelola yang lemah semakin diakui sebagai risiko material yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pelaporan keberlanjutan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis yang dibutuhkan oleh investor, regulator, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.





# TINJAUAN TEORI

## ○ Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

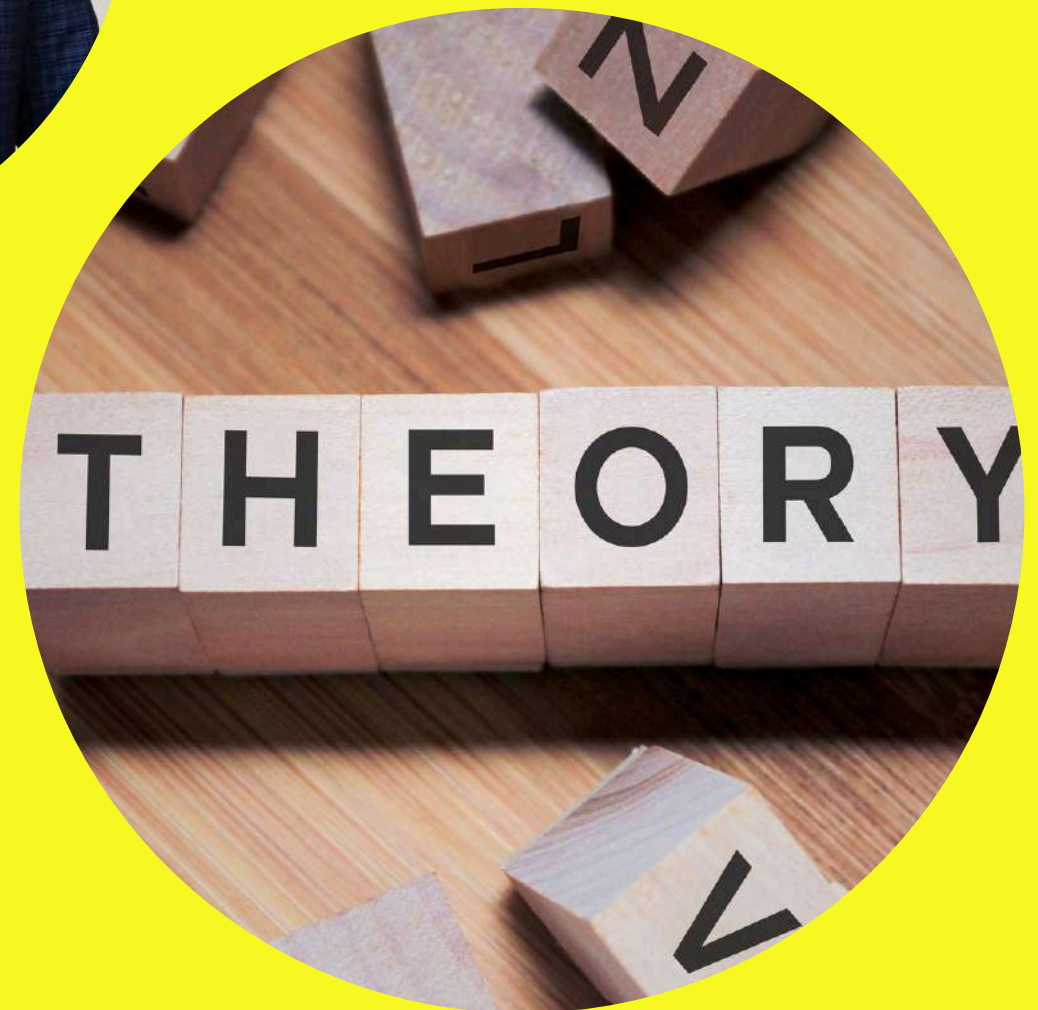
Teori Pemangku Kepentingan (Freeman, 1984) menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan yang lebih luas seperti karyawan, masyarakat, regulator, dan lingkungan.

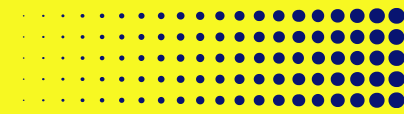
## ○ Teori Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure Theory)

Perusahaan yang memiliki motivasi reputasi atau ingin mendapatkan pembiayaan hijau cenderung melaporkan informasi keberlanjutan secara lebih lengkap.

## ○ Pelaporan Terintegrasi dan Konsep Nilai Jangka Panjang

Konsep pelaporan terintegrasi menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak hanya berasal dari modal finansial, tetapi juga modal lingkungan, sosial, manusia, dan tata kelola.





### PEMBAHASAN:

Pembahasan mengenai penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 (SPK) di Indonesia dapat dilihat dari beberapa dimensi utama: proses adopsi, isi standar, implikasi operasional, tata kelola risiko, mekanisme assurance, integrasi dengan regulasi lokal, dan tantangan teknis serta strategis.

# 1. PROSES ADOPSI DAN LEGITIMASI STANDAR SPK

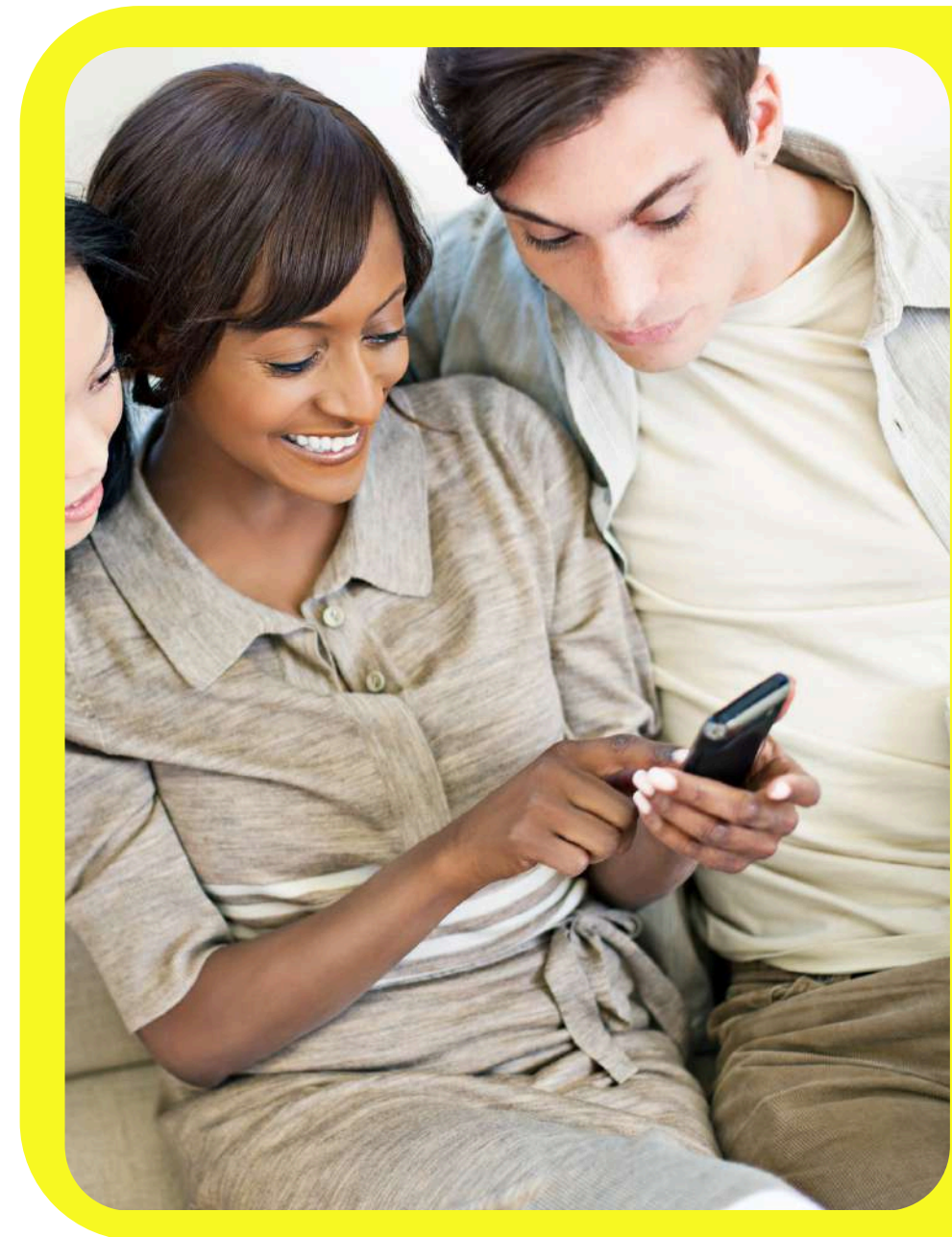
- Pada 1 Juli 2025, Dewan Standar Keberlanjutan IAI (DSK IAI) secara resmi mengesahkan PSPK 1 dan PSPK 2 sebagai bagian dari Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK).
- Proses pengesahan ini dilakukan melalui mekanisme due-process yang cukup inklusif. DSK IAI mengadakan dengar pendapat (public hearing) secara daring dan luring, mengundang regulator, pelaku industri, akademisi, dan publik umum. Sekitar 700 orang ikut dalam konsultasi publik, dan ada 54 surat tanggapan tertulis dari berbagai pemangku kepentingan.
- Dengan mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 dari ISSB, SPK menempatkan Indonesia dalam kerangka pelaporan keberlanjutan global yang semakin diakui.
- Peluncuran resmi SPK dilakukan bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK pada 11 Agustus 2025, menandakan komitmen tinggi dari regulator keuangan nasional terhadap transformasi pelaporan keberlanjutan.
- Menurut peta jalan yang diterbitkan oleh IAI, implementasi SPK dilakukan secara bertahap dan dibarengi dengan pembangunan ekosistem (capacity building, koordinasi regulasi, kesiapan assurance) untuk memastikan kualitas pelaporan dan kredibilitasnya





## 2. STRUKTUR DAN ISI PSPK 1 & PSPK 2

- PSPK 1 (Persyaratan Umum) mengatur elemen-elemen dasar pengungkapan keberlanjutan: kerangka konseptual, definisi entitas pelapor, konsep materialitas, lokasi dan waktu pengungkapan, serta inti konten seperti governance, strategy, risk management, dan metrics & targets.
- PSPK 2 fokus pada risiko dan peluang iklim secara spesifik: menuntut pengungkapan emisi gas rumah kaca (GRK), skenario iklim, strategi transisi iklim, dan dampak finansial dari risiko iklim.
- Dalam draf eksposur PSPK 2, DSK IAI memberikan kelonggaran periode tiga tahun untuk pengungkapan Scope 3 emissions (emisi rantai nilai) sesuai dengan Greenhouse Gas Protocol. Hal ini dipertimbangkan karena kesulitan entitas dalam mengumpulkan data untuk Scope 3.
- PSPK menetapkan bahwa pengungkapan harus dilakukan dalam laporan keuangan umum (general purpose financial reports), sehingga menyelaraskan pelaporan keberlanjutan dengan laporan keuangan tradisional.





### 3. IMPLIKASI OPERASIONAL BAGI PERUSAHAAN

#### 1) Integrasi Sistem dan Data

- Perusahaan harus menyiapkan sistem pengumpulan data ESG (Environmental, Social, Governance) yang terstruktur agar bisa memenuhi persyaratan PSPK. Misalnya, pencatatan emisi GRK, identifikasi skenario risiko iklim, dan pengukuran metrik keberlanjutan.
- Data yang diperlukan untuk pengungkapan harus reliable, dapat di-audit, dan relevan dengan strategi bisnis jangka panjang. Karena itu, departemen keuangan, risiko, keberlanjutan, dan operasional perusahaan perlu berkolaborasi erat untuk menyusun data input dan laporan output.
- Untuk emisi Scope 3, karena kompleksitas dan ketergantungan pada rantai nilai eksternal, banyak perusahaan harus menjalin kerja sama dengan pemasok, distributor, atau mitra bisnis lainnya agar data rantai pasok bisa dikumpulkan. Kelonggaran tiga tahun oleh DSK IAI untuk pengungkapan Scope 3 memberikan ruang adaptasi awal.

#### 2) Strategi Manajemen Risiko dan Transisi Iklim

- Dengan PSPK 2, perusahaan wajib menyusun skenario iklim (climate scenarios) yang mencerminkan berbagai kemungkinan masa depan iklim dan bagaimana hal itu akan memengaruhi bisnis mereka.
- Selain skenario, perusahaan harus merumuskan strategi mitigasi dan adaptasi: misalnya rencana transisi ke energi terbarukan, pengurangan emisi, efisiensi energi, atau investasi teknologi rendah karbon.
- Manajemen risiko harus diperluas tidak hanya untuk risiko pasar dan keuangan, tetapi juga risiko fisik (misalnya kerusakan aset karena cuaca ekstrem) dan risiko transisi (misalnya regulasi karbon, perubahan preferensi konsumen).

#### 3) Dampak pada Struktur Organisasi

- Perusahaan mungkin perlu mewujudkan fungsi keberlanjutan (sustainability function), atau memperkuat struktur ESG di dalam organisasi: tim keberlanjutan, manajer risiko iklim, analis ESG, dan akuntan keberlanjutan.
- Komite dewan (board) dan manajemen puncak harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait keberlanjutan — misalnya menetapkan target iklim, menetapkan anggaran ESG, dan menilai risiko strategis jangka panjang.





## 4. ASSURANCE DAN PENGAWASAN PELAPORAN KEBERLANJUTAN

- Pelaporan SPK menimbulkan kebutuhan untuk assurance keberlanjutan (sustainability assurance), yaitu verifikasi eksternal atas informasi ESG agar kredibilitas laporan dapat dipertanggungjawabkan. Karena data ESG (misalnya emisi) bersifat non-keuangan, metode assurance mungkin berbeda dari audit keuangan tradisional.
- Auditor dan akuntan perlu mengembangkan kompetensi dan metodologi assurance ESG, termasuk verifikasi data emisi, proses pengukuran metrik keberlanjutan, dan validasi skenario iklim.
- IAI telah menyertakan pembangunan kapasitas (capacity building) sebagai bagian dari roadmap SPK untuk memastikan bahwa assurance ESG dapat dijalankan dengan standar profesional yang tinggi.
- 5. 6. • Mekanisme pengawasan regulasi juga sangat penting: OJK, sebagai otoritas jasa keuangan, berpotensi menetapkan persyaratan assurance atau verifikasi ESG sebagai bagian dari regulasi keberlanjutan. Pelibatan OJK dalam peluncuran SPK menunjukkan kemungkinan ini.







## 5. KETERKAITAN DENGAN REGULASI LOKAL DAN KEBIJAKAN NASIONAL

- OJK memainkan peran penting dalam kerangka regulasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Menurut Booklet Perbankan OJK 2025, OJK dan OECD pernah melakukan FGD untuk menyusun kerangka transition plan (rencana transisi) bagi institusi keuangan sesuai pengungkapan iklim IFRS S2.
- Regulasi lokal (misalnya POJK) mungkin akan disesuaikan agar selaras dengan SPK. Dalam siaran pers IAI disebutkan bahwa OJK mempertimbangkan revisi POJK keberlanjutan untuk mengakomodasi kebutuhan pengungkapan yang lebih komprehensif.
- Adopsi SPK menjadi bagian dari strategi nasional untuk mendorong keuangan hijau dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Standar ini dapat memperkuat kerangka kebijakan nasional terkait pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.



## 6. TANTANGAN STRATEGIS DAN RISIKO IMPLEMENTASI

### 1) Ketidakseragaman Kapasitas Entitas

Ada disparitas besar antara perusahaan besar dan kecil: entitas besar lebih mungkin memiliki sumber daya finansial dan kapasitas manusia untuk menerapkan SPK secara penuh, sementara perusahaan kecil mungkin menghadapi hambatan besar. Draf eksposur PSPK 2 sendiri menyadari hal ini.

### 2) Biaya Transisi dan Investasi Awal

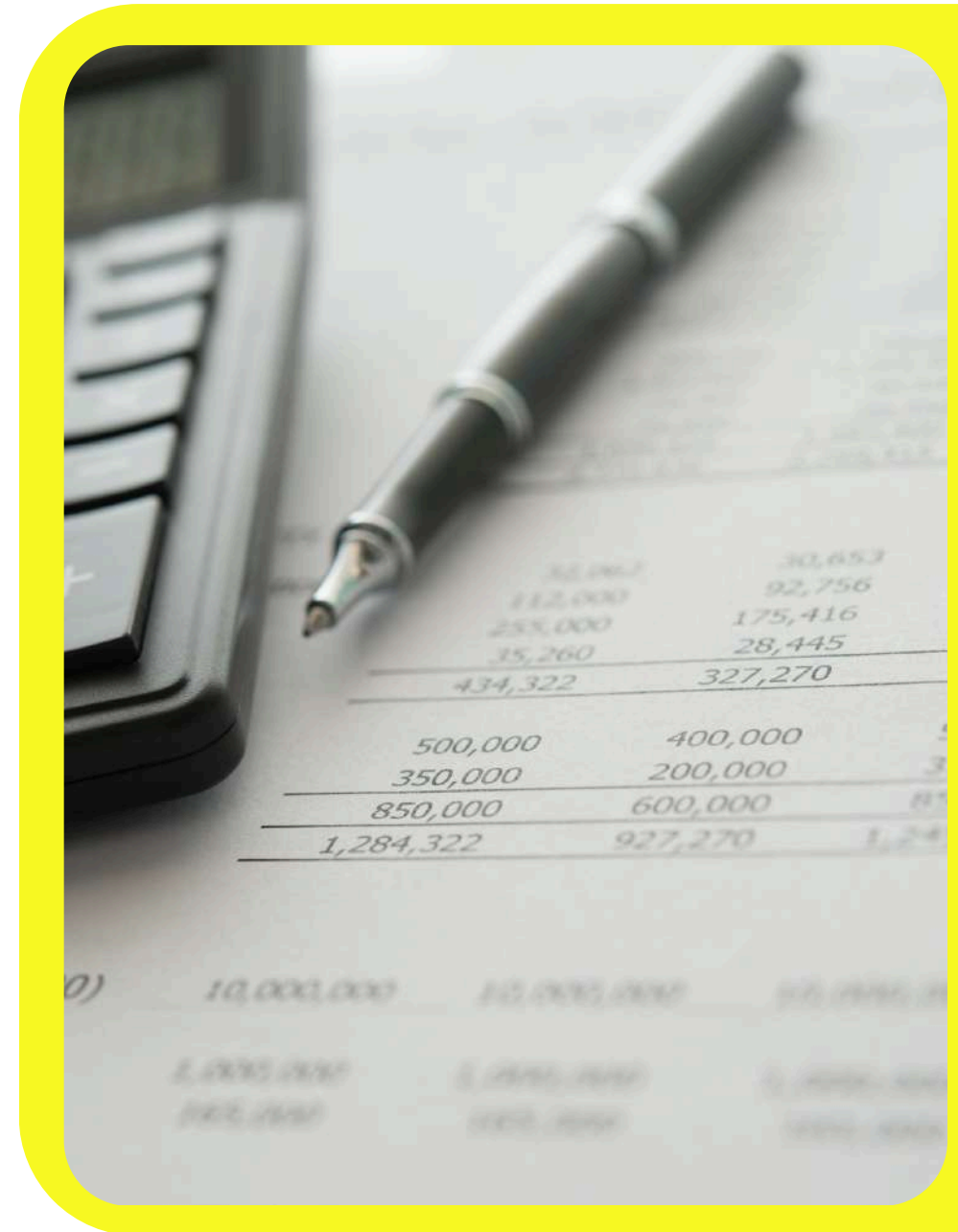
Penerapan SPK akan menuntut investasi besar: sistem IT pelaporan ESG, modul pelaporan, pelatihan SDM, dan proses assurance.

### 3) Risiko Reputasi

Bila perusahaan menyatakan komitmen iklim tetapi gagal memenuhi target (misalnya target emisi), hal ini dapat menimbulkan risiko reputasi dan kepercayaan publik.

### 4) Ketidakpastian Regulasi Lanjut

Meskipun SPK disahkan oleh IAI, belum sepenuhnya jelas entitas mana saja yang akan diwajibkan secara reguler oleh regulator (OJK) dalam jangka panjang. Sesuai IFRS Snapshot untuk Indonesia, entitas yang wajib akan ditentukan oleh OJK.







## 7. PELUANG STRATEGIS DAN NILAI TAMBAH

### 1) Akses ke Pembiayaan Hijau

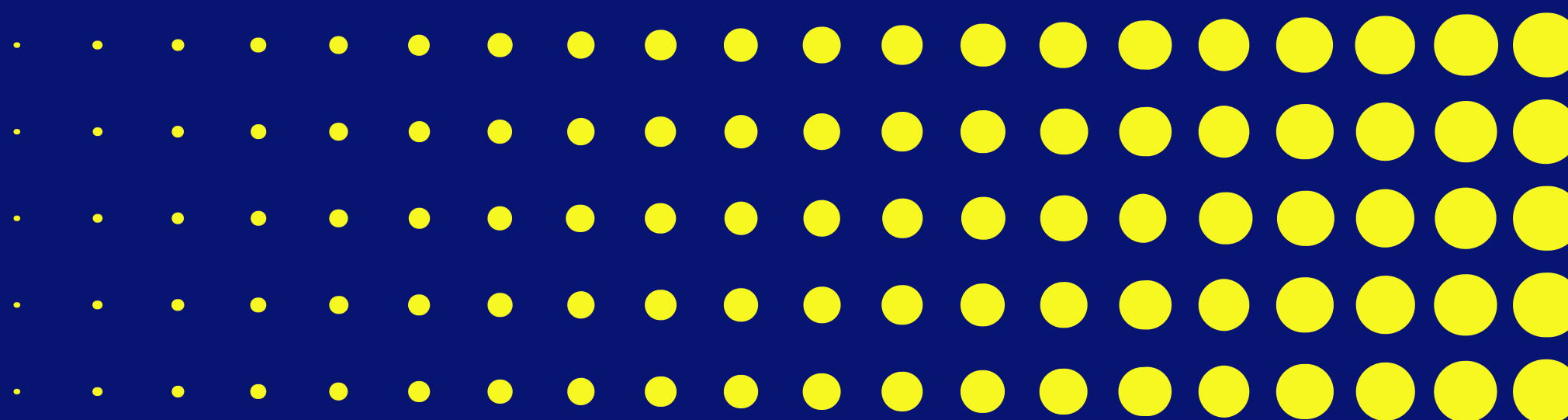
Standar SPK akan mempermudah perusahaan dalam mengakses instrumen keuangan hijau, seperti green bonds, pinjaman ESG, dan fasilitas keuangan berkelanjutan lainnya, karena investor akan lebih percaya pada kualitas pengungkapan ESG.

### 2) Penguatan Tata Kelola dan Strategi Jangka Panjang

Dengan laporan keberlanjutan yang terintegrasi dengan laporan keuangan, dewan direksi dan manajemen bisa menggunakan informasi ESG sebagai input strategis dalam perencanaan jangka panjang.

### 3) Reputasi dan Keunggulan Kompetitif

Perusahaan yang proaktif dalam pelaporan keberlanjutan berpeluang mendapatkan reputasi baik di pasar global, menarik investor ESG, dan menjadi mitra pilihan dalam rantai pasok yang berorientasi hijau.





Universitas  
Lampung



# PENUTUP

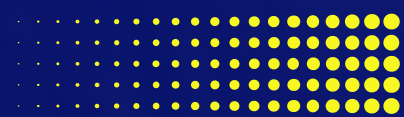
Penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 merupakan tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju praktik pelaporan keberlanjutan yang berkualitas dan berstandar internasional. Dengan mengacu pada IFRS S1 dan S2, perusahaan Indonesia dapat meningkatkan kualitas, transparansi, dan komparabilitas informasi keberlanjutan mereka. Penerapan SPK juga memperkuat peran profesi akuntansi dalam ekonomi hijau dan mendukung strategi nasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim.







Universitas  
Lampung



# TERIMA KASIH PERHATIAANNYA

Sampai Jumpa →

